

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH BANTARAN
SUNGAI TALLO TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI
KELURAHAN TALLO KECAMATAN TALLO KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

RIFAT ALFASYA

D521 16 516



**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH BANTARAN
SUNGAI TALLO TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH**

Disusun dan diajukan oleh

RIFAT ALFASYA
D521 16 516

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan
Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si

NIP. 19661218 199303 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si. IPM

NIP. 19741006 200812 1 002

Ketua Program Studi, Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si. IPM

NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifat Alfasya

NIM : D521 16 516

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan berjudul

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Tallo terhadap Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan, yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi, yang akan dipublikasi oleh Penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, Agustus 2023

Yang Menyatakan



Rifat Alfasya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai panutan hidup, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan tugas akhir ini merupakan persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi jenjang Strata 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Penulis sadar dalam penyusunan tugas akhir ini memiliki banyak kesalahan namun berkat petunjuk dari Allah SWT diikuti dengan doa dan usaha serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Tallo terhadap Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar”** dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis menerima dan mengharapkan kritik, saran, tanggapan, dan penilaian demi kemajuan tugas akhir ini dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar penelitian ini menjadi bermanfaat.

Penulis berharap agar tugas akhir ini memberikan manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta almamater tercinta dan segala usaha yang telah dilakukan bernilai ibadah oleh Allah SWT. Akhir kata penulis hendak berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini.

Gowa, Juni 2023

Rifat Alfasya

ABSTRAK

RIFAT ALFASYA. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Tallo terhadap Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar* (dibimbing oleh Mimi Arifin dan Abdul Rachman Rasyid)

Pertumbuhan penduduk mempengaruhi aktivitas masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan konsumsi yang akan menimbulkan peningkatan produksi sampah. Sampai saat ini sampah merupakan permasalahan yang kompleks dan upaya pengurangan produksi sampah terus dilakukan, salah satunya dengan menggunakan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*). Salah satu bentuk penanganan sampah berbasis 3R adalah Bank Sampah. Namun permasalahan yang ada pada Bank Sampah di Kelurahan Tallo adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya terhadap kegiatan pengelolaan sampah, khususnya pada daerah permukiman kumuh sekitar bantaran sungai Tallo. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi karakteristik masyarakat permukiman kumuh sekitar bantaran sungai Tallo; (2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Karakteristik masyarakat dapat dilihat dari segi sosial-ekonomi, bencana dan adaptasi, prasarana dasar, tingkat pengetahuan tentang sampah, dan bentuk-bentuk partisipasi dalam pengelolaan sampah; (2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu faktor jenis pekerjaan, faktor pelayanan bank sampah, dan faktor sumber daya masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Permukiman Kumuh, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

RIFAT ALFASYA. *Factors Influencing Community Participation in Waste Management in the Slum Settlement of Tallo Sub-District, Tallo District, Makassar City (supervised by Mimi Arifin and Abdul Rachman Rasyid)*

The growth of the population significantly impacts community activities, leading to increased consumption and consequently generating more waste. Waste management remains a complex issue, and efforts to reduce waste production are continuously pursued, including the implementation of the 3R approach (reduce, reuse, recycle). One form of waste management based on the 3R approach is the establishment of Waste Banks. However, one of the challenges faced by the Waste Banks in Tallo Village is the limited community participation, particularly in the slum settlements along the Tallo riverbank. This study aims to: (1) identify the characteristics of the slum settlement communities along the Tallo riverbank, and (2) determine the factors influencing community participation in waste management. The analytical techniques employed include qualitative descriptive analysis and factor analysis. The research findings indicate: (1) The characteristics of the community can be observed in terms of socio-economic factors, disaster and adaptation, basic infrastructure, knowledge about waste, and forms of participation in waste management. (2) The factors influencing community participation in waste management are the type of occupation, the services provided by waste banks, and the community's resources.

Keywords: Community Participation, Slum Settlement, Waste Management

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perumahan dan Permukiman	11
2.1.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman	11
2.1.2 Pengertian Permukiman Kumuh	12
2.1.3 Karakteristik Permukiman Kumuh	14
2.2 Persampahan	19
2.2.1 Pengertian Sampah dan Jenisnya	19
2.2.2 Pengelolaan Sampah	20
2.2.3 Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	21
2.2.4 Bank Sampah	22
2.3 Partisipasi Masyarakat	22
2.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	22
2.3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat	23
2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	24
2.4 Penelitian Terdahulu	28
2.5 Kerangka Konsep.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Jenis Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Pengambilan Sampel	36
3.6 Variabel Penelitian	37
3.7 Teknik Analisis Data	40
3.7.1 Pertanyaan Penelitian Pertama	40
3.7.2 Pertanyaan Penelitian Kedua	40
3.8 Definisi Operasional	45

3.9	Kerangka Penelitian	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Gambaran Umum Wilayah Studi	47
4.1.1	Gambaran Umum Kota Makassar	47
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Tallo	51
4.1.3	Gambaran Umum Kelurahan Tallo	53
4.2	Mengidentifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh	56
4.2.1	Karakteristik Masyarakat	56
4.2.2	Kondisi Fisik Rumah, Bencana, dan Adaptasi	65
4.2.3	Kondisi Prasarana Dasar	66
4.2.4	Pengetahuan, Pemahaman, dan Partisipasi terhadap Pengolahan Sampah	80
4.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	93
4.3.1	Penentuan Variabel.....	93
4.3.2	Uji Korelasi.....	95
4.3.3	Proses Factoring atau Ekstraksi.....	96
4.3.4	Rotasi Faktor.....	98
4.3.5	Interpretasi Faktor.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		103
5.1	Kesimpulan	103
5.2	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		105
<i>CURRICULUM VITAE</i>		109
LAMPIRAN		110

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Aspek dan Kriteria Kekumuhan.....	14
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3	Kebutuhan Data.....	34
Tabel 4	Variabel Penelitian	38
Tabel 5	Kriteria Uji KMO	42
Tabel 6	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tallo	47
Tabel 7	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar menurut Kecamatan.....	48
Tabel 8	Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tallo.....	51
Tabel 9	Jumlah Penduduk Kecamatan Tallo.....	53
Tabel 10	Jumlah Penduduk Kelurahan Tallo berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 11	Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 12	Jumlah Responden berdasarkan Kelompok Usia	57
Tabel 13	Jumlah Responden berdasarkan Penduduk Asli dan Penduduk Pendatang	58
Tabel 14	Jumlah Responden berdasarkan Status Rumah.....	58
Tabel 15	Jumlah Responden berdasarkan Status Lahan	59
Tabel 16	Jumlah Responden berdasarkan Lama Menetap	59
Tabel 17	Jumlah Responden berdasarkan Alasan Menetap	60
Tabel 18	Jumlah Responden berdasarkan Jumlah KK.....	60
Tabel 19	Jumlah Responden berdasarkan Kondisi Keamanan	61
Tabel 20	Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 21	Jumlah Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan	62
Tabel 22	Jumlah Responden berdasarkan Pekerjaan Sampingan	62
Tabel 23	Jumlah Responden berdasarkan Lokasi Pekerjaan.....	63
Tabel 24	Jumlah Responden berdasarkan Penghasilan.....	65
Tabel 25	Jumlah Responden Kondisi Fisik Perumahan.....	65
Tabel 26	Jumlah Responden berdasarkan Bencana yang Terjadi	66
Tabel 27	Jumlah Responden berdasarkan Penanganan Bencana	66
Tabel 28	Jumlah Responden berdasarkan Jenis Perkerasan Jalan	67
Tabel 29	Jumlah Responden berdasarkan Kondisi Jaringan Jalan.....	67
Tabel 30	Jumlah Responden berdasarkan Kondisi Drainase	70
Tabel 31	Jumlah Responden berdasarkan Sumber Air	71
Tabel 32	Jumlah Responden berdasarkan Ketersediaan WC.....	72
Tabel 33	Jumlah Responden berdasarkan Pengelolaan Air Limbah.....	73
Tabel 34	Jumlah Responden berdasarkan Sumber Listrik	74
Tabel 35	Jumlah Responden berdasarkan Kondisi Telepon dan Internet	75
Tabel 36	Jumlah Responden berdasarkan Pengetahuan tentang Jenis Sampah.....	80
Tabel 37	Jumlah Responden berdasarkan Pengetahuan tentang Sampah Bisa Menghasilkan Uang	81
Tabel 38	Jumlah Responden berdasarkan Pengetahuan tentang 3R	82
Tabel 39	Jumlah Responden berdasarkan Pemilahan Sampah di Rumah.....	83
Tabel 40	Jumlah Responden berdasarkan Bentuk Pengelolaan Sampah	83
Tabel 41	Jumlah Responden berdasarkan Pengetahuan tentang Bank	

	Sampah.....	84
Tabel 42	Jumlah Responden berdasarkan Keaktifan Bank Sampah	85
Tabel 43	Jumlah Responden berdasarkan Proses Penyetoran Bank Sampah .	86
Tabel 44	Jumlah Responden berdasarkan Keterjangkauan Lokasi Bank Sampah.....	86
Tabel 45	Jumlah Responden berdasarkan Frekuensi Kegiatan Bank Sampah	86
Tabel 46	Jumlah Responden berdasarkan Bentuk Keanggotaan di Bank Sampah	87
Tabel 47	Jumlah Responden berdasarkan Pelatihan yang Diadakan di Lingkungan	89
Tabel 48	Jumlah Responden berdasarkan Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan terkait Sampah.....	89
Tabel 49	Jumlah Responden berdasarkan Pengadaan Iuran Sampah.....	92
Tabel 50	Jumlah Responden berdasarkan Persetujuan Adanya Iuran Sampah.....	92
Tabel 51	Jumlah Responden berdasarkan Kegiatan Gotong Royong	92
Tabel 52	Jumlah Responden berdasarkan Keaktifan dalam Kegiatan Gotong Royong	93
Tabel 53	Penentuan Variabel	94
Tabel 54	Nilai Skewness dan Kurtosis Variabel.....	94
Tabel 55	<i>Bartlett's Test</i> dan KMO MSA	95
Tabel 56	<i>Anti-image Matrices</i>	96
Tabel 57	<i>Communalities</i>	96
Tabel 58	Hasil Ekstraksi.....	97
Tabel 59	<i>Component Matrix</i> sebelum rotasi	98
Tabel 60	<i>Component Matrix</i> setelah rotasi.....	99
Tabel 61	Pengelompokan Variabel berdasarkan Faktor Baru yang Terbentuk	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Lokasi Penelitian	33
Gambar 2	Tahap-Tahap Analisis Faktor	44
Gambar 3	Peta Administrasi Kota Makassar	50
Gambar 4	Peta Administrasi Kecamatan Tallo	52
Gambar 5	Peta Administrasi Kelurahan Tallo	55
Gambar 6	Diagram Akomodasi yang Digunakan	64
Gambar 7	Jenis Jaringan Jalan yang Terdapat di Lokasi Penelitian	68
Gambar 8	Permukaan Jalan dengan Kondisi Baik	68
Gambar 9	Permukaan Jalan yang Mengalami Kerusakan.....	69
Gambar 10	Drainase dengan Kondisi Baik	70
Gambar 11	Drainase dengan Kondisi Rusak.....	70
Gambar 12	Fasilitas WC Umum di Lokasi Penelitian	74
Gambar 13	Peta Kondisi Prasarana Dasar Jalan dan Drainase Permukiman RT02 RW03.....	76
Gambar 14	Peta Kondisi Prasarana Dasar Jalan dan Drainase Permukiman RT02 RW05.....	77
Gambar 15	Peta Kondisi Prasarana Dasar Jalan dan Drainase Permukiman RT03 RW05.....	78
Gambar 16	Peta Kondisi Prasarana Dasar Jalan dan Drainase Permukiman RT04 RW05.....	79
Gambar 17	Diagram Persentase Sampah Organik dan Anorganik	81
Gambar 18	Bank Sampah yang Terletak pada Rumah Ketua RT 04 RW 05 ..	85
Gambar 19	Manfaat yang Dirasakan Masyarakat terhadap Bank Sampah.....	88
Gambar 20	Garis Plot Nilai Eigenvalues terhadap Jumlah Komponen	98

DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
3R	<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>
APAR	Alat Pemadam Api Ringan
BPS	Badan Pusat Statistik
EFA	<i>Explanatory Factor Analysis</i>
ha	Hektar
KK	Kepala Keluarga
km ²	Kilometer Persegi
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin
MSA	<i>Measuring Sampling Adequacy</i>
PCA	<i>Principal Component Analysis</i>
RT	Rukun Tetangga
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RW	Rukun Warga
TPS	Tempat Pengelolaan Sampah
WC	<i>Water Closet</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu kota erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk (Nursyahbani dan Pigawati, 2015). Urbanisasi merupakan salah satu dari sebab meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di suatu kota. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah kebutuhan ruang untuk bermukim (Nursyahbani dan Pigawati, 2015). Tingginya jumlah penduduk di suatu kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan permukiman yang layak huni (Nafsi dkk., 2019). Peningkatan urbanisasi dan penambahan jumlah kawasan perumahan dan permukiman yang kurang tertata dapat meningkatkan kekumuhan pada kota (Subekti dkk., 2020). Hal ini menyebabkan munculnya beberapa kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dan di pusat kota (Resad dkk., 2017).

Semakin maju suatu kota maka semakin banyak permasalahan yang muncul, dan semakin tinggi bangunan yang menjulang maka semakin banyak pula wilayah kumuh yang bermunculan di sekitarnya (Damayanti dkk., 2020). Sebagian besar wilayah di kota-kota besar ditempati oleh permukiman yang tidak terencana (Nursyahbani dan Pigawati, 2015). Disisi lain, dalam kampung kota yang padat juga terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan kondisi sosial budaya ekonomi penduduknya yang selanjutnya dapat menyebabkan munculnya permukiman kumuh (Budihardjo, 1997 dalam Nursyahbani dan Pigawati, 2015).

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas hunian yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang rendah serta tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Fitria dan Setiawan, R.P., 2014). Rumah maupun sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan serta fasilitas sosial lainnya (Simanjuntak, D.N.,

2022). Adanya permukiman kumuh menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan khususnya kualitas di lingkungan permukiman yang terkait dengan kondisi sarana, prasarana, dan bangunan di kawasan tersebut (Simanjuntak, D.N., 2022).

Masyarakat yang bermukim di kawasan kumuh merupakan suatu keterpaksaan bagi mereka yang tidak terampil dan harus menerima keadaan lingkungan pemukiman yang tidak layak dan di bawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah, kepadatan dan ketidakteraturan letak bangunan yang memberikan dampak negatif dari segi fisik seperti bahaya bencana kebakaran maupun dampak sosial seperti tingkat kriminal yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Subekti dkk., 2020). Dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, masyarakat yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat (Subekti dkk., 2020).

Salah satu masalah yang ditimbulkan dari permukiman kumuh adalah rendahnya cakupan pelayanan persampahan serta bertambahnya volume sampah non-organik yang sulit didaur ulang serta permasalahan pada pengelolaan sampah akibat dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggalnya (Subekti dkk., 2020). Minimnya penyediaan sarana dan prasarana di permukiman kumuh umumnya dilatarbelakangi oleh permasalahan legalitas permukiman tersebut, sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan pada permukiman tersebut. Sebagai contoh tidak tersedianya sarana persampahan maka masyarakat akan cenderung mencemari lingkungan dengan sampah sehingga terjadi timbunan sampah di setiap sudut daerah permukiman (Putri, dkk., 2021 dalam Maghribi, M.R.A.D, 2022).

Seiring berjalannya waktu, sampah terus meningkat jika tidak ada pengelolaan yang baik terkait sampah dan berpotensi menimbulkan suatu permasalahan serius (Suwerda dan Kurniawan, 2019; Yudiarno dkk., 2021 dalam Sanjaya dkk., 2023). Penumpukan sampah yang terus-menerus dibiarkan akan membawa pengaruh bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik pengaruh

positif maupun pengaruh negatif (Saputro dkk., 2016; Siagian dkk., 2022 dalam Sanjaya dkk., 2023). Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan dapat menimbulkan permasalahan seperti bau tidak sedap, menimbulkan penyakit, menjadi sarang hewan kotor, dan memberikan kesan kumuh terhadap lingkungan (Zahrotun dan Saputro, 2021). Namun sampah juga bisa menjadi sumber mata pencaharian jika dikelola dengan benar (Saputro dkk., 2016; Siagian dkk., 2022 dalam Sanjaya dkk., 2023).

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik (Hartono, 2020 dalam Maghribi, M.R.A.D, 2022). Sampah tidak hanya cukup dibuang pada tempatnya, namun juga perlu adanya pengelolaan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai guna. Saat ini, pengelolaan sampah hanya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani karena merasa sudah cukup dengan hanya membayar uang iuran sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah tanggung jawab dari pemerintah. (Rielasari, 2018 dalam Wari, 2021). Pemerintah memiliki keterbatasan dalam upaya pengelolaan sampah jika tidak didukung dengan partisipasi dari masyarakat sekitar (Zahrotun dan Saputro, 2021). Kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi faktor yang paling dominan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan sampah adalah peran masyarakat (Destisari, 2022). Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat harus dimulai dengan mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan sampah serta dampak dari permasalahan sampah (Suntari, 2018 dalam Wari, 2021). Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah diperlukan wawasan mengenai nilai lebih serta keuntungan yang didapatkan terhadap individu ataupun lingkungan secara mandiri (Destisari, 2022).

Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan langsung masyarakat yang dimana sebagai penghasil sumber sampah di lingkungan tempat tinggalnya (Suntari, 2018 dalam Wari, 2021). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menjelaskan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah (Suryani, A.S., 2014). Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yaitu paradigma yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Suryani, A.S., 2014).

Salah satu metode untuk mengelola sampah adalah dengan menggunakan paradigma mencegah timbulnya sampah (*reduce*), menggunakan ulang sampah (*reuse*), serta mendaur ulang sampah (*recycle*) (Sriwijayanti, dkk., 2022 dalam Sanjaya dkk., 2023). Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah dengan cara pengelolaan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*) (Suryani, A.S., 2014). Prinsip dari 3R merupakan pemilahan limbah yang dapat digunakan kembali sehingga dapat mengurangi timbulan sampah (Destisari, 2022). Pengenalan dan penerapan konsep 3R merupakan salah satu cara untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah yang awalnya merupakan benda yang tidak berguna menjadi hal yang bermanfaat (Destisari, 2022).

Salah satu kegiatan berbasis 3R yang dapat memecahkan permasalahan sampah yang telah berjalan dan mengalami peningkatan di Indonesia adalah program bank sampah (Solihin, 2018 dalam Destisari, 2022). Selain untuk mengurangi masalah yang timbul karena penumpukan sampah, juga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti ditukarkan dengan bahan-bahan pokok dan perlengkapan sehari-hari (Linda, 2016 dalam Zahrotun dan Saputro, 2021). Oleh karena itu, diperlukan tindakan tepat agar pengelolaan bank sampah dapat terlaksanakan dengan baik. Selain itu tindak lanjut yang dilaksanakan harus mampu memberdayakan masyarakat untuk mendorong masyarakat agar bisa memanfaatkan sampah dan mampu mengelola sampah dengan baik (Nisa dan Saputro, 2021 dalam Sanjaya dkk., 2023).

Merubah perilaku masyarakat untuk mebiasakan diri dalam memilah sampah berdasarkan jenisnya bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan sosialisasi ketegasan dan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah (Zahrotun dan Saputro, 2021). Sampai saat ini kegiatan pengelolaan sampah berbasis 3R masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilah sampah (Suryani, A.S., 2014).

Negara Indonesia telah mengupayakan pengelolaan sampah yang baik dengan menyusun peraturan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (Setyaningrum, 2015). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah, dimana kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah adalah arah kebijakan dalam pengurangan dan penanganan permasalahan sampah dan perogram-program pengurangan dan penanganan permasalahan sampah. Berdasarkan peraturan yang telah disusun, pemerintah di kota-kota besar di Indonesia telah mensosialisasikan berbagai metode dalam pengelolaan sampah seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*), bank sampah, dan lain-lain (Setyaningrum, 2015).

Kota Makassar merupakan salah satu kota Indoneisa yang memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat dan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini menyebabkan Kota Makassar tidak luput dari masalah permukiman kumuh dan persampahan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar tentang Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, telah tercatat bahwa sebanyak 127 kelurahan termasuk dalam kategori kumuh dengan total luas kumuh sebesar 650.74 Ha. Luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar diklasifikasikan ke dalam kategori kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Kategori kumuh berat terdapat di 36 kelurahan, kategori kumuh sedang di 50 kelurahan dan 41 kelurahan masuk kategori kumuh ringan. Berdasarkan kajian terhadap Dokumen SIAP (Slum Improvement Action Plan) Kota Makassar tahun 2017, terdapat tiga aspek kumuh yang dominan di Kota Makassar, yaitu 45,36% merupakan sistem sarana dan prasarana persampahan yang belum terolah, 41.09% kondisi drainase lingkungan tidak sesuai standar teknis dan

40.08% kondisi bangunan hunian belum memenuhi standar kelayakan. Ketiga aspek rata-rata berada pada tipologi kumuh dataran rendah, pusat kota, bantaran kanal, tepi sungai kumuh sempadan pantai bahkan terdapat bangunan kumuh di atas sungai (Damayanti dkk., 2020).

Di Kota Makassar sendiri, program bank sampah sebagai upaya penanganan sampah mulai beroperasi sejak tahun 2011 sebanyak 9 unit bank sampah. Saat ini, Makassar memiliki sebanyak 104 bank sampah. Selama 5 tahun, secara bertahap Pemerintah Kota Makassar menargetkan 1000 bank sampah akan hadir dan tersebar di seluruh RW di Kota Makassar (Selomo, dkk., 2016). Menurut data dari wawancara dengan kepala UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbantuk sekitar 800 Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar. Namun, tidak semuanya dapat bertahan sampai sekarang, yang aktif sekarang hanya sekitar 25% atau sekitar 250 Bank Sampah Unit (BSU) (Fatmawati, dkk., 2019). Menurut penelitian Ashariani (2022) menjelaskan tidak semua bank sampah tersebut dari masyarakat, ada yang dari inisiasi tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), ada bank sampah sekolah, dan ada dari instansi-instansi pemerintah. Beberapa bank sampah sudah tidak beroperasi. Sekitar 600-700 unit bank sampah masih berjalan dengan efektif, selebihnya tidak ada aktivitas pengelolaan sampah didalamnya.

Salah satu kawasan rawan sampah di Makassar adalah Kecamatan Tallo dengan penduduk yang berjumlah 148.288 jiwa dan terus mengalami perkembangan serta pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat (Ashariani, 2022). Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar tentang Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, Kecamatan Tallo merupakan wilayah yang terdiri dari kelurahan yang sebagian besar dikategorikan sebagai kumuh berat. Di wilayah ini masih ditemukan sampah berserakan di sepanjang jalan dan saluran pembuangan air. Kecamatan Tallo sendiri merupakan kecamatan lahirnya bank sampah dan merupakan kecamatan yang menjadi percontohan tingkat nasional sampah semakin menurun setiap tahunnya disebabkan karena semakin berkurangnya masyarakat yang menjual sampah ke Bank Sampah Sektoral Kecamatan Tallo serta banyaknya bank sampah swasta yang

terbentuk dengan nilai jual yang lebih tinggi sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menyetor sampah ke bank sampah swasta (Ashariani, 2022).

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar tentang Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, salah satu kelurahan yang dikategorikan sebagai kumuh berat adalah Kelurahan Tallo yang berada pada Kecamatan Tallo. Dari segi kualitas lingkungan, Kelurahan Tallo merupakan daerah di kawasan pesisir yang patut diperhatikan, karena sebagian masyarakat hidup permukiman kumuh di atas air dengan kualitas lingkungan permukiman yang dikategorikan termasuk kumuh berat (Mardjuni, 2021). Kondisi lingkungan permukiman pada Kelurahan Tallo dapat dilihat pada rumah penduduk yang merupakan bangunan yang tidak permanen, rumah yang berada di atas air, jalan-jalan yang belum diasplal, sulitnya air bersih dan saluran air yang tidak teratur, pembuangan sampah/kotoran sembarangan serta perilaku warga yang masih tidak mempedulikan kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang air limbah rumah tangga di sungai yang mengakibatkan penumpukan sampah dan bau yang mencemari udara lingkungan (Mardjuni, 2021). Hal ini sebanding dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga tidak heran jika Kelurahan Tallo memiliki kondisi permukiman yang dapat di kategorikan kumuh sesuai dengan parameter yang telah dijelaskan diatas (Mardjuni, 2021).

Di Kelurahan Tallo sendiri, khususnya di kawasan permukiman kumuh bantaran Sungai Tallo, terdapat bank sampah yang telah berdiri (Arifin, dkk., 2023). Pembangunan bank sampah di Kelurahan Tallo ditujukan untuk membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah agar mempunyai nilai ekonomi, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi perilaku baru dalam kehidupan masyarakat (Selomo, dkk., 2016). Namun fasilitas tersebut belum berjalan dengan optimal dalam pengoperasiannya (Arifin dkk., 2023). Begitupun pelatihan tentang pengelolaan sampah yang diadakan dalam kelompok masyarakat yang sudah ada dan berpotensi menjadi produk yang bernilai ekonomi namun tidak berjalan sebagaimana mestinya (Arifin dkk., 2023). Selain karena kondisi lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besar merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah tentunya berdampak bagi keikutsertaan

masyarakat dalam kegiatan berbasis masyarakat seperti Bank Sampah dan pelatihan pengelolaan sampah di lingkungannya (Arifin dkk., 2023).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji karakteristik permukiman kumuh yang berada di bantaran sungai Kelurahan Tallo serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan tiga pokok rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik masyarakat dan lingkungan permukiman kumuh bantaran Sungai Tallo di Kelurahan Tallo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat dan lingkungan permukiman kumuh bantaran Sungai Tallo di Kelurahan Tallo.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah/Swasta
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat atau pihak developer untuk menetapkan kebijakan dan meningkatkan kualitas pembangunan dan pengembangan wilayah pada perumahan dan permukiman.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan masalah keamanan dan kenyamanan lingkungan serta berupaya mengatasi

kesenjangan sosial yang terjadi pada kawasan perumahan dan permukiman sekitarnya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kesenjangan sosial ekonomi yang sering terjadi di daerah perumahan dan permukiman khususnya kawasan perkotaan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial, penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor dari karakteristik masyarakat permukiman kumuh bantaran sungai Tallo yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah.
2. Secara spasial, lokasi penelitian ini berada pada wilayah administrasi Kecamatan Tallo Kota Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat uraian latar belakang diadakannya penelitian, pertanyaan dari penelitian yang diajukan, tujuan penelitian, manfaat bagi pemerintah/swasta, masyarakat, peneliti, uraian mengenai ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini memuat kajian literatur berupa teori dan undang-undang terkait penelitian seperti karakteristik permukiman kumuh, pengertian partisipasi, bentuk partisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan sistem pengelolaan sampah 3R.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan mengenai proses penelitian yang dilakukan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penjabaran definisi operasional, serta pemaparan kerangka penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini memuat tentang hasil dan pembahasan data yang telah dikumpulkan dan diteliti dari hasil survei pada lokasi penelitian serta melakukan analisis-analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan, terdapat saran yang berkaitan dengan judul penelitian dan diajukan untuk para peneliti di masa mendatang yang hendak mengambil permasalahan yang sama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman

2.1.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan dan kawasan permukiman adalah kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat. Kawasan permukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prakehidupan dan penghidupan.

Dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan perkotaan.

Sedangkan menurut Kamus Tata Ruang (1997) dalam Simanjuntak (2022), Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan.

Finch (1957) dalam Ritohardoyo (2000) mengungkapkan bahwa permukiman adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia, mencakup fasilitas seperti bangunan rumah, jalur jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia.

Perumahan dan permukiman juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Perumahan beserta prasaarana pendukungnya menjadi cerminan dari jati diri

manusia dalam lingkungannya serta memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, sehingga perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan serta peningkatan kehidupan masyarakat (Undang-Undang no. 1 Tahun 2011). Perumahan dan permukiman selain berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan perwujudan lingkungan sosial yang tertib, juga merupakan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri perumahan sebagai penyedia lapangan kerja serta pendorong pembentukan modal yang besar. Melalui peningkatan dan pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, berperan serta secara aktif dalam pembangunan, dan mampu meningkatkan pemupukan modal bagi pembangunan selanjutnya (Undang-Undang no. 1 Tahun 2011).

Menurut Yudohusodo (1991), permukiman juga mempunyai fungsi ekonomi yang sangat penting bagi manusia sebagai insan ekonomi, karena kepemilikan rumah merupakan investasi jangka panjang yang dapat menjamin penghidupan di masa depan.

2.1.2 Pengertian Permukiman Kumuh

Kota yang mengalami perkembangan akibat dari pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, budaya serta interaksinya dengan daerah sekitarnya (Nursyahbani dan Pigawati, 2015). Sebagian besar pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan yang mendukung pertumbuhan tersebut, sehingga perkembangan yang terjadi di kawasan perkotaan dapat mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh (Sobrin, 2001 dalam Nursyahbani dan Pigawati, 2015).

Menurut Kurniasih (2021) dalam Simanjuntak (2022) kumuh adalah kesan atau gambaran standar yang berlaku, baik standar secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup persyaratan rumah sehat, kepadatan bangunan, penghasilan kelas menengah serta kebutuhan sarana dan prasarana.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh (slum area) adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak memiliki persyaratan untuk hunian, baik secara teknis maupun nonteknis (Nafsi dkk., 2019). Kuswantojo (2005) dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman dengan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas konstruksi yang rendah, sarana dan prasarana permukiman yang tidak memadai yang merupakan akibat dari kemiskinan. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pendapatan penduduk menyebabkan penduduk tersebut akan menempati lahan-lahan ilegal dan membentuk kawasan-kawasan kumuh dan liar dan menyebabkan berkembangnya berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang dianggap rendah, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu bentuk penyimpangan perilaku manusia akibat dari keadaan lingkungan yang sudah tidak mendukung lagi (Ridlo, 2011 dalam Nafsi dkk., 2019).

Menurut Bank Dunia (1999) dalam Simanjuntak (2022) wilayah kawasan kumuh merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis yang dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana sosial budaya. Tumbuhnya kawasan kumuh disebabkan oleh arus urbanisasi yang tidak terbandung.

Menurut Ridho dalam Invasi (2022), permukiman kumuh merupakan suatu kawasan atas rumah-rumah yang tidak layak untuk ditempati, memiliki kepadatan tinggi, kondisi bangunan yang rentan, kepemilikan lahan yang sah, kurang terawatnya sarana dan prasarana yang menjadi indikator bahwa kawasan tersebut kurang terawat dan menyebabkan kemiskinan. Sedangkan menurut Suharini dalam Salma (2019) permukiman kumuh diartikan sebagai kelompok bangunan di suatu

daerah dicirikan oleh keburukan yang berlebihan, kondisi kurang sehat, kekurangan fasilitas yang akan menimbulkan bahaya kesehatan jasmani penduduk, dalam mana lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan.

2.1.3 Karakteristik Permukiman Kumuh

Ditjen Bangda Kemendagri menyatakan bahwa karakteristik permukiman kumuh antara lain: sebagian besar penduduknya berpenghasilan rendah serta memiliki sistem sosial yang rentan; sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal; lingkungan permukiman, dan prasarananya di bawah standar minimal untuk dijadikan tempat bermukim; kondisi fisik bangunan tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal; permukiman rawan banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan serta kawasan permukiman berpotensi menimbulkan ancaman fisik maupun non-fisik bagi masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya (Nursyahbani dan Pigawati, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 18 ayat 1, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari: (1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Penyediaan air minum; (4) Drainase lingkungan; (5) Pengelolaan ier limbah; (8) Pengelolaan persampahan; dan (7) Proteksi kebakaran. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat 7 aspek kekumuhan dan 16 indikator yang dijadikan acuan dalam penyusunan baseline dan penilaian tingkat kekumuhan. Aspek dan kriteria tersebut dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 1 Aspek dan Kriteria Kekumuhan

No.	Aspek	Kriteria
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
		Tingkat kepadatan bangunan
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan
		Kualitas permukiman jalan lingkungan
		Kualitas permukiman jalan lingkungan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum

No.	Aspek	Kriteria
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air
		Ketidaktersediaan drainase
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Kualitas konstruksi drainase
		Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran
		Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber: Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum

Karakteristik permukiman kumuh yang paling terlihat adalah kondisi hunian tempat tinggalnya yang sebagian besar tidak permanen, dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak terstruktur, sarana prasarana lingkungan sangat minim dan tidak memadai (Avelar 2008, dalam Gusmaini, 2010). Sedangkan karakteristik diri dari seseorang sebagai warga masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain, jenis kelamin, umur, suku dan etnis, agama, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, perilaku keinovatifan, jumlah dan kepadatan penduduk (hal ini menentukan ragam status dan luas rata-rata kepemilikan lahan), sikap masyarakat terhadap penegakan peraturan-peraturan yang ada, manajemen dan resolusi konflik (Mardikanto, 2015).

Menurut Suparlan dalam Susilowati (2009), karakteristik permukiman kumuh dapat dilihat dari kondisi berikut:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian tempat tinggal dan pengguna ruang-ruangnya menggambarkan penghuninya yang kurang mampu secara ekonomi atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi atau kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Permukiman kumuh adalah suatu satuan komunitas yang hidup secara individu dengan batas-batas kebudayaan sosial yang jelas yaitu terwujud sebagai:
 - a. Sebuah komunitas tunggal yang berada di tanah milik negara, oleh karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar atau ilegal.
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RW atau RT.
 - c. Sebuah satuan komunitas tunggal yang terlihat sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terlihat sebagai kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara ekonomi dan sosial tidak homogen. Warganya memiliki jenis pekerjaan, penghasilan, serta asal tempat tinggal mereka yang beranekaragam. Begitu juga dengan golongan sosial yang berdasarkan kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai pekerjaan sampingan di sektor informal.

Sedangkan menurut Sinulingga (2005) dalam Nasrullah (2015), ciri-ciri atau karakteristik permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Para ahli berpendapat bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/Ha, maka akan timbul masalah yang diakibatkan oleh kepadatan tersebut, antara perumahan yang dibangun tidak lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis, dan perlindungan terhadap penyakit.
2. Jalan-jalan sempit yang bersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.
3. Kondisi fasilitas jaringan drainase yang tidak memadai dan terdapat jalan-jalan tanpa drainase sehingga apabila hujan, kawasan tersebut mudah tergenang air.
4. Kondisi fasilitas pembuangan air limbah sangat minim, diantaranya ada yang langsung membuang kotoran ke saluran dekat dengan rumah.
5. Kondisi fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan, atau membeli air dari pihak lain.
6. Tata bangunan sangat tidak teratur dan sebagian besar bangunan tidak permanen dan sangat darurat.

7. Kepemilikan hak atas lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para penghuni tidak memiliki status hak milik ataupun hak pakai.

Begitu juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Surtiani (2006) dalam Togobu (2015), bahwa karakteristik permukiman kumuh terdiri atas tiga bagian mendasar, yaitu:

1. Karakter fisik yaitu karakter dari sarana dan prasarana yang dapat dilihat dari kondisi fisiknya seperti penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan jalan lingkungan.
2. Karakter sosial yaitu karakter masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dengan kondisi ekonomi seperti pendapatan rendah, bekerja sebagai buruh atau pekerja di sektor informal.
3. Karakter lahan, yaitu karakter lahan-lahan yang dijadikan masyarakat untuk tinggal dan mendirikan bangunan, seperti masyarakat yang mendirikan bangunan rumahnya di lahan milik pemerintah atau milik swasta yang biasa tidak digunakan karena dianggap tidak produktif dan mereka tidak memiliki sertifikat hak milik dari tanah tersebut.

Selain itu, menurut Doxiadis (1968) dalam Nursyahbani dan Pigawati (2015), terdapat lima elemen dasar permukiman, yaitu *Nature* (alam), adalah elemen lahan yang dimanfaatkan untuk membangun tempat tinggal maupun fungsi lainnya; *Man* (manusia), yaitu pribadi maupun kelompok yang membangun dan bertempat tinggal; *Society* (masyarakat), yaitu elemen yang di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan sosial antar manusia sehingga membentuk suatu ikatan dalam masyarakat; *Shells* (rumah), yaitu bangunan tempat tinggal dengan fungsinya masing-masing; *Networks* (jaringan), yaitu elemen berupa sarana prasarana yang mendukung fungsi lingkungan.

Berdasarkan teori dari Doxiadis (1968), elemen tersebut dapat dijabarkan menjadi Alam, yaitu kondisi iklim alam, kondisi topografi, kekayaan alam; Manusia, yaitu kebutuhan ruang, kebutuhan emosi seperti hubungan manusia dan rasa aman; Masyarakat, yaitu, kepadatan penduduk, kondisi sosial, kondisi

ekonomi, dan tingkat pendidikan; Bangunan, yaitu rumah hunian dan fasilitas umum; Sarana Prasarana, yaitu jaringan jalan, jaringan drainase, air bersih, listrik, telepon dan internet, dan sampah. Berdasarkan penjelasan tersebut, identifikasi karakteristik permukiman kumuh dapat dilakukan dengan melihat karakteristik penghuni, karakteristik hunian, dan karakteristik sarana prasarana pada lingkungan tersebut.

Selain pendapat dan teori dari para ahli, ciri-ciri atau kriteria permukiman kumuh dapat diidentifikasi dari hasil penelitian dan obeservasi dari beberapa jurnal penelitian terdahulu yang membahas tentang karakteristik permukiman kumuh. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Fitria dan Setiawan (2014), identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh dapat ditinjau dari lima aspek, yaitu kondisi fisik, ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana, sosial, dan juga bahaya. Untuk lebih jelasnya, kelima aspek tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kondisi Fisik

Kondisi fisik dapat dilihat dari kondisi bangunan dimana bangunan tersebut dapat dibedakan menjadi bangunan permanen, semi permanen, dan non-permanen. Hal tersebut dapat dilihat dari bahan material yang digunakan masyarakat dalam membangun rumah mereka.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dapat dilihat dari mata pencaharian penghuni permukiman. Penghasilan masyarakat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan.

3. Ketersedian Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana dapat dilihat dari kondisi sarana prasarana yang terdapat di permukiman, seperti kondisi air bersih, aksesibilitas, persampahan, kondisi jalan, dan kondisi drainase.

4. Kondisi Sosial

Kondisi sosial dapat dilihat dari masyarakat penghuni permukiman yang merupakan penduduk asli ataupun penduduk pendatang serta alasan pemilihan lokasi tempat tinggal yang umumnya mempertimbangkan faktor kedekatan antara tempat tinggal dengan lokasi bekerja.

5. Bahaya (*hazard*)

Kondisi bahaya (*hazard*) dilihat dari seberapa parah bencana yang terjadi dan seberapa lama durasi bencana di serta penanganan terhadap bencana di permukiman tersebut.

2.2 Persampahan

2.2.1 Pengertian Sampah dan Jenisnya

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Davis dan Cornwell dalam Sulistyorini dkk. (2015), kata sampah padat merupakan suatu kata yang umum digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kita buang. Sampah padat terdiri dari berbagai macam benda yang sudah dibuang, mengandung zat-zat yang dapat membahayakan maupun tidak berbahaya.

Gelbert dkk. dalam Riadi (2015) menjelaskan, berdasarkan asal dan tingkat penguraiannya, sampah padat dapat dibedakan menurut jenisnya seperti sampah organik yang dapat terurai melalui proses alami. Sampah organik dapat ditemukan pada sampah rumah tangga seperti sampah dari dapur, sayuran, dan daun. Sedangkan sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti sampah dari hasil proses industri. Sebagian zat dari sampah organik tidak dapat diuraikan secara alami, sedangkan zat lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama seperti botol plastik, kaleng, dan sebagainya.

Berdasarkan SNI 19-3983-1995, sumber sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah perumahan dan non perumahan. Untuk lebih jelasnya sumber sampah akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Perumahan, yaitu sumber sampah yang berasal dari sampah rumah tangga baik dari sampah rumah permanen, rumah semi permanen, maupun rumah non permanen.
2. Non perumahan, yaitu sumber sampah yang berasal dari sampah kantor, ruko/toko, pasar, sekolah, tempat ibadah, jalan, industri, serta fasilitas umum lainnya kecuali sampah yang berasal dari sampah rumah tangga.

Sedangkan menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, sampah yang tidak dapat diolah, dan juga sampah yang timbul secara tidak periodik.

2.2.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan baik agar sampah-sampah tersebut tidak mengganggu dan mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi terhadap kondisi alam dan keindahan lingkungan. Menurut Sulastriyani dkk (2015), pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan sehingga sampah tidak sampai mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Berikut adalah proses pengelolaan sampah menurut Sulastriyani dkk (2015):

a. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab dari masing-masing penghuni rumah tangga atau industri yang menghasilkan sampah. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka perlu membangun atau mengadakan tempat khusus pembuangan sampah, kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke tempat penampungan sampah (TPS) dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir (TPA). Mekanisme sistem pengangkutan sampah untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan sampah untuk daerah pedesaan umumnya dikelola oleh masing-masing keluarga, tanpa memerlukan TPS maupun TPA. Sampah-sampah daerah pedesaan umumnya didaur ulang menjadi pupuk.

b. Pemusnahan dan Pengelolaan Sampah

Pemusnahan dan pengelolaan sampah padat dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut: Ditanam (*landfill*); Dibakar (*inceneration*); Dijadikan Pupuk (*compositing*); Penghancuran (*pulverization*); Makanan Ternak (*hogfeeding*); dan Pemanfaatan Ulang (*recycling*).

2.2.3 Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

Salah satu upaya melakukan pengelolaan sampah adalah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Berdasarkan Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Tempat Pengelolaan Sampah 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.

Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah berbasis 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh. Penanganan sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS 3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (Kementerian PUPR, 2017).

Menurut Iliyani (2023), konsep utama pengelolaan sampah pada TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang selanjutnya akan diolah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Penyelenggaraan TPS 3R harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan melalui:

1. Proses pelibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
2. Proses pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
3. Proses pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan TPS 3R.

Iliyani (2023) menjelaskan, pemisahan sampah dan pengelolaan di TPS 3R dilakukan pada jenis sampah seperti sampah B3 (akan dikelola sesuai dengan ketentuan) rumah tangga, sampah kertas, sampah plastik, logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan baku kompos).

2.2.4 Bank Sampah

Konsep pengelolaan Bank Sampah merupakan penerapan sistem dari pengelolaan sampah 3R yang artinya proses pendauran ulang sampah dengan menekankan agar bagaimana sampah yang dianggap tidak berguna lagi tetapi barang tersebut masih memiliki nilai ekonomi yang bisa dijadikan sumber penghasilan oleh masyarakat (Shentika, 2016).

Bank Sampah menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah anorganik yang masih dapat didaur ulang (Shentika, 2016). Menurut Rahmanda (2021), Bank Sampah merupakan tempat menabung sampah yang telah terpilih menurut jenis sampahnya serta sampah yang ditabung adalah sampah yang masih memiliki nilai secara ekonomis.

Bank Sampah merupakan solusi yang tepat dalam melakukan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat (Rahmanda, 2021). Dengan diadakannya sosialisasi dan edukasi mengenai Bank Sampah, diharapkan masyarakat bisa ikut bergabung menjadi nasabah serta ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan (Rahmanda, 2021).

2.3 Partisipasi Masyarakat

2.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Bomby dalam Erwin (2015), partisipasi didefinisikan sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan menurut Beal dalam Erwin (2015), partisipasi, terlebih lagi partisipasi yang tumbuh karena pengaruh dair luar, merupakan gejala yang dapat menunjukkan sebagai proses perubahan eksogen.

Berdasarkan pendapat Mardikanto dan Soebianto (2013), karakteristik dari proses partisipasi adalah semakin mantapnya jaringan sosial yang baru yang

membentuk jaringan sosial yang dapat mewujudkan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan, sehingga masyarakat menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah kewajiban dari pemerintah sendiri, tetapi menuntut keterlibatan masyarakat (Mardikanto, 2015). Inti dari partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat (Mikkelsen, 2011).

2.3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Dusseldorp (1981) dalam Mardikanti dan Subianto (2013), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Sedangkan menurut Sastropetro dan Sulistyorini (2015), jenis partisipasi meliputi: pemikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Untuk lebih jelasnya, jenis partisipasi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemikiran

Adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat, atau buah pikiran konstruktif, baik dalam menyusun rencana program maupun memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman serta pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Partisipasi Tenaga

Adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga dan bantuan fisik yang dapat menunjang keberhasilan program yang dijalankan.

3. Partisipasi Keterampilan

Adalah partisipasi yang memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

4. Partisipasi Barang

Adalah partisipasi dalam bentuk sumbangan barang atau harta benda berupa alat-alat kerja.

5. Partisipasi Uang

Adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Wahyuni (2016) dalam Amrullah (2021) mengatakan partisipasi yang tumbuh di masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lama tinggal.

Dalam penelitian Rahmanda (2021) faktor yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan (Rahmanda, 2021). Beberapa faktor yang diprediksi memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah antara lain jenis kelamin; usia; pendapatan; pendidikan; ketersediaan waktu luang; frekuensi pengumpulan barang daur ulang; mempunyai sikap peduli lingkungan; kenyamanan dalam daur ulang sampah; dan pengetahuan tentang daur ulang sampah (Matsumoto dalam Mandasari, 2016). Sedangkan faktor lain adalah faktor eksternal yang merupakan faktor dari pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program pengelolaan sampah (Sunarti dalam Erawati, 2013). Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi pemerintah/tokoh masyarakat, sarana prasarana,

petugas bank sampah, sistem menabung sampah yang mudah, dan jarak sampah rumah ke bank (Rahmanda, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan Wahyuni (2016) dalam Amrullah (2021) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal memiliki keseimbangan antar keduanya. Hal tersebut dikarenakan karakteristik masyarakat dan lingkungan sosial pada setiap kawasan atau lokasi penelitian berbeda-beda. Berdasarkan paparan dari penelitian terdahulu serta kondisi pada lokasi penelitian, maka penulis menyimpulkan dan menggunakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Menurut Amrullah (2021) jenis kelamin menjadi salah satu faktor internal yang menentukan keberhasilan dalam pemeliharaan prasarana dasar. Soedarno (1992) dalam Amrullah (2021) mengatakan bahwa dalam system pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan Wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi. Amrullah (2021) menambahkan, meskipun demikian peranan masyarakat yang berjenis kelamin Wanita tidak dapat diabaikan. Kebanyakan mereka akan berperan sebagai penyedia konsumsi baik berupa makanan maupun minuman

2. Umur

Menurut Amrullah (2021) faktor usia bagi seseorang akan sangat berpengaruh terhadap keaktifan dalam menjalankan suatu kegiatan. Semakin tua seseorang akan mengurangi peran sertanya untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat terutama yang berbentuk fisik. Hal ini disebabkan karena masyarakat dengan usia tergolong tua tenaganya semakin berkurang, namun masyarakat yang berusia matang dan lebih tua sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dikarenakan dapat memberikan pemikiran yang konstruktif kepada masyarakat yang lebih muda agar dapat melaksanakan kegiatan dengan optimal.

3. Tingkat Pendidikan

Menurut Amrullah (2021) pendidikan seseorang dapat dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi karena pendidikan dianggap dapat

mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya dan sikap tersebut diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pekerjaan Utama

Amrullah (2021) menjelaskan bahwa jenis pekerjaan akan sangat mempengaruhi seseorang untuk berperan dalam kegiatan masyarakat, terutama terhadap penyediaan waktu luang. Masyarakat yang disibukkan dengan urusan sehari-hari kadangkala kurang tertarik dengan kegiatan kemasyarakatan.

5. Pekerjaan Sampingan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pekerjaan seseorang menentukan waktu luangnya dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang maka semakin sedikit pula waktu luang yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan.

6. Pendapatan

Menurut Amrullah (2021) tingkat penghasilan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Baross dalam Amrullah (2021) menyatakan bahwa penduduk yang memiliki pendapatan yang lebih besar kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara masyarakat dengan penghasilan rendah melakukan kebanyakan pekerjaan fisik dan tidak berkontribusi dalam bentuk uang, sementara buruh yang berpenghasilan rendah akan cenderung berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

7. Pengetahuan tentang Persampahan

Berdasarkan penelitian dari Rahmanda (2021) pengetahuan tentang daur ulang persampahan merupakan faktor internal yang mempengaruhi masyarakat dalam mengelola persampahan. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi lokasi penelitian dan pertanyaan kuesioner peneliti memasukkan faktor pengetahuan tentang persampahan ke dalam penelitian dan membagi faktor tersebut menjadi pengetahuan tentang jenis dan sumber sampah, pengetahuan tentang sampah bisa menghasilkan uang, pengetahuan tentang penanganan sampah 3R, dan pengetahuan tentang adanya bank sampah.

8. Kondisi Bank Sampah

Berdasarkan penelitian dari Rahmanda (2021) sistem menabung bank sampah dan lokasi bank sampah merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat dalam mengelola persampahan. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi lokasi penelitian dan pertanyaan kuesioner peneliti memasukkan faktor kondisi bank sampah penelitian dan membagi faktor tersebut menjadi kondisi keaktifan bank sampah, kemudahan dalam penyetoran sampah, dan lokasi bank sampah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu adalah kajian literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang melakukan kajian tentang karakteristik dan factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
1	T. Rahmanda, W. Widjonarko (2021)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Masyarakat dalam Kegiatan Bank Sampah Sempulur Asri di RW 05 Kelurahan Gedawang	1) Mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah	- Faktor Internal - Faktor Eksternal	- Analisis Statistik Deskriptif - Analisis Faktor	- Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam kegiatan bank sampah adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari individu mereka sendiri	Jurnal Teknik PWK Tahun 2021, Universitas Diponegoro
2	Fitrizta Yuliana, Septu Haswindy (2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Permukiman pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah 2) Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 3) Menganalisis hubungan karakteristik masyarakat dan lingkungan permukiman dengan tingkat partisipasi masyarakat	- Karakteristik masyarakat dan lingkungan permukiman - Tingkat partisipasi masyarakat - Hubungan karakteristik masyarakat dan lingkungan terhadap tingkat partisipasi	- Analisis Deskriptif Kualitatif	- Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan, pendapatan, luas halaman, keadaan lingkungan, sikap terhadap lingkungan dan persepsi masyarakat - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dikategorikan rendah atau kurang	Jurnal Ilmu Lingkungan Tahun 2017, Universitas Diponegoro

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
3	Amrullah (2021)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa	1) Mengidentifikasi bentuk partisipasi dan tingkat masyarakat di Kelurahan Samata 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat	3) Bentuk Partisipasi Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi	- Analisis statistik deskriptif Analisis statistik (uji regresi linear berganda)	- faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pemeliharaan prasarana dasar pada permukiman di Kelurahan Samata adalah faktor pekerjaan, frekuensi, dan motivasi.	Skripsi, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin
4	Iliyani (2023)	Strategi Peningkatan Kinerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar	1) Mengidentifikasi jenis sampah dan berupa volume timbulan sampah yang diproduksi 2) Menilai kinerja TPS 3R dalam mengolah jenis dan volume timbulan sampah yang diproduksi 3) Merumuskan strategi peningkatan kinerja TPS 3R dalam mengolah jenis dan volume timbulan sampah yang diproduksi	- Jenis sampah - Timbulan sampah - Kinerja TPS 3R - Strategi peningkatan kerja TPS 3R	- Analisis Deskriptif Kualitatif - Analisis SWOT	-Strategi peningkatan kinerja TPS 3R yaitu; (1) Peningkatan partisipasi masyarakat; (2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan pembuatan kebijakan/aturan; (3) Memaksimalkan lahan TPS 3R yang ada dengan mengatur area-area sesuai standar yang ada.	Skripsi, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
5	Sulistyorini (2015)	Partisipasi Masyarakat dalam Prngelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug	1) Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarkat 2) Mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat	- Bentuk partisipasi - Tingkat Partisipasi	- Teknik deskriptif kualitatif	- Bentuk- bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi pemikiran, keterampilan, dan uang. - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah terbagi dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah	Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 2 2015, Universitas Diponegoro

Sumber: Penulis, 2023

2.5 Kerangka Pikir

